



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana**

*Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Tantangan Institusional ASEAN dengan Adanya
AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik**

Skripsi

Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Oleh
Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh
6091901216

Bandung
2023



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana**

*Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Tantangan Institusional ASEAN dengan Adanya
AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik**

Skripsi

Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Oleh
Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh
6091901216

Pembimbing
Idil Syawfi, S.IP., M.Si

Bandung
2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh
Nomor Pokok : 6091901216
Judul : Tantangan Institusional ASEAN dengan Adanya AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik

Telah diuji dalam Ujian jenjang Sarjana
Pada Senin, 26 Juni 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

:  _____

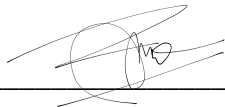
Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

:  _____

Anggota

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc

:  _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh
Nomor Pokok Mahasiswa : 6091901216
Program Studi : Hubungan Internasional
Pembimbing : Idil Syawfi, S.IP., M.Si. (20110153) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Senin tanggal 26 June 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Tantangan ASEAN dalam Mendorong Implementasi Normanya (Treaty of Amity and Cooperation, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, dan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone) dengan Adanya AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik
Judul (Bahasa Inggris) : ASEAN Challenges in Pushing the Implementation of Its Norms (Treaty of Amity and Cooperation, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, and the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone) with AUKUS in the Indo-Pacific Region

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia) judul dipendekan, keywords dikurangi.

Judul (Bahasa Inggris)

2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :

3. Perbaikan di Bab 1

- Harus dirapikan fokusnya apakah akan berbicara tentang norma atau institusi. bedakan antara norma dan institusi.
- Nyatakan AUKUS sebagai institusi yang memiliki norma yang bertabrakan dengan institusi ASEAN yang memiliki normanya sendiri.
- Hati hati menggunakan data2 yang membicarakan Amerika Serikat.
- ASEAN memang didesain untuk gagal. (hint ini dihilangkan saja).
- jelaskan norma AUKUS. Lihat deklarasi AUKUS.
- jelaskan inti atau esensi norma ASEAN.
- masukan: gunakan teori yang mengkaji hubungan antar norma.
- KP: stated bahwa prisoner dilemma sebagai bagian dari teori.

4. Perbaikan di Bab 2

- perhatikan jika ASEAN memang di sidelining oleh AUKUS.

5. Perbaikan di Bab 3

jelaskan bagaimana ASEAN mencoba membuat normanya berjalan. jangan sampai ada lompatan argumen.

6. Perbaikan di Bab 4

7. Perbaikan di Bab 5

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 26 June 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_hi.fisip@unpar.ac.id
6/26/2023 11:14:42

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

Penguji,

adri@unpar.ac.id
6/26/2023 11:00:55

Penguji (Pembimbing),

idil.syawfi@unpar.ac.id
6/26/2023 11:01:44

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Penguji,

naraindra.prima@unpar.ac.id
6/26/2023 11:01:01

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

[Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc](#)

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh

NPM : 6091901216

Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Tantangan Institusional ASEAN dengan Adanya AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar



Bandung, 3 Juli 2023

Handwritten signature of Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh.

Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh

Abstrak

Nama : Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh
NPM : 6091901216
Judul : Tantangan Institusional ASEAN dengan Adanya AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan alasan di balik kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh ASEAN secara institusional dengan adanya AUKUS di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai sebuah organisasi kawasan di Asia Tenggara yang bertujuan untuk menciptakan kawasan yang damai, ASEAN menciptakan berbagai norma sebagai ‘aturan main’ bagi negara-negara anggotanya sekaligus negara dari luar kawasan yang ingin menjalin kerjasama atau beraktivitas di kawasan Asia Tenggara. AUKUS, di sisi lain, dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sebagai pakta pertahanan trilateral yang mengakibatkan instabilitas sekaligus memperkeruh situasi ketidakpastian sekaligus konflik kepentingan di Indo-Pasifik. Penelitian ini kemudian mencoba untuk menjawab pertanyaan terkait Mengapa ASEAN menghadapi tantangan institusional dengan adanya AUKUS di kawasan Indo-Pasifik? Dengan menggunakanacamata Strategic Functional Theory serta teori permainan Prisoner’s Dilemma, penelitian ini menemukan AUKUS sebagai salah satu indikator bagi tingginya ketidakpastian strategis dan konflik kepentingan di Indo-Pasifik. Dalam situasi tersebut, ASEAN sebagai organisasi internasional yang ideal seharusnya bisa berperan dengan menjadi medium pertukaran informasi, menyediakan mekanisme yang kuat dan mengikat, serta menjadi fasilitator untuk menjamin hubungan yang resiprokal dan saling menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki konflik kepentingan di kawasannya. Namun, ketidakmampuan ASEAN untuk menyediakan mekanisme yang kuat dan mengikat adalah tantangan institusional yang membuat ASEAN tidak mampu bersikap terhadap pembentukan AUKUS di Indo-Pasifik.

Kata Kunci: ASEAN, AUKUS, Strategic Functional Theory, Indo-Pasifik

Abstract

Name : Axtell Giuseppe Chrysallino Teguh
NPM : 6091901216
Title : ASEAN's Institutional Challenges with AUKUS in Indo-Pacific

This study aims to show the reasons behind the difficulties or challenges faced by ASEAN institutionally with the presence of AUKUS in the Indo-Pacific region. As a regional organization in Southeast Asia that aims to create a peaceful region, ASEAN creates various norms as 'rules of the game' for its member countries as well as countries from outside the region who wish to establish cooperation or function in the Southeast Asian region. AUKUS, on the other hand, was formed by the United States, Britain and Australia as a trilateral defense pact which resulted in instability as well as aggravating the situation as well as conflicts of interest in the Indo-Pacific. This research then tries to answer a related question: Why does ASEAN face institutional challenges with the presence of AUKUS in the Indo-Pacific region? Using the perspective of Strategic Functional Theory and the theory of the Prisoner's Dilemma game, this research finds AUKUS as an indicator for high strategic vulnerability and market conflict in the Indo-Pacific. In this situation, ASEAN as an ideal international organization should be able to play a role by becoming a medium for exchanging information, providing a strong and binding mechanism, as well as being a facilitator to ensure reciprocal and mutually beneficial relations for countries that have conflicting interests in the region. However, ASEAN's inability to provide a strong and binding mechanism is a litigation that renders ASEAN unable to burden the establishment of AUKUS in the Indo-Pacific.

Keywords: ASEAN, AUKUS, Strategic Functional Theory, Indo-Pacific

Kata Pengantar

Skripsi menjadi tahap akhir bagi seorang calon sarjana sebelum memiliki gelarnya. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi bisa penulis rampungkan dengan berbagai tantangan baik dalam penulisan maupun tantangan-tantangan personal. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan syukur sekaligus terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa karena semua pikiran dan upaya yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini telah dilancarkan.

Skripsi dengan judul ‘Tantangan Institusional ASEAN dengan Adanya AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik’ ini menjadi penutup dari perjalanan selama empat tahun menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Maka dari itu, penulisan skripsi ini tidak hanya menjadi sebuah kewajiban bagi penulis untuk merampungkan jenjang sarjana, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri dalam menuangkan berbagai pemikiran dan pembelajaran yang telah ditempuh selama ini. Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi diskursus Hubungan Internasional di waktu mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Meskipun yang tercantum di halaman judul adalah nama saya, tetapi skripsi ini tidak akan tuntas tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun moril. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap orang yang bersinggungan dengan penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, mulai dari proses rancangan penelitian, sidang proposal, penyelesaian skripsi, sidang, hingga revisi akhir. Nama yang tidak disebut bukan berarti tidak berjasa, tapi beberapa orang di bawah ini rasanya perlu disebutkan satu per satu.

- Untuk Papi, Mama, dan Auxie. Terima kasih karena selalu percaya. Dinamika saya selama empat tahun ini, tidak mungkin terjadi, tanpa kepercayaan dari kalian. Terima kasih karena sudah mengajarkan apa arti kedewasaan dan keberanian untuk bersikap. Skripsi ini menjadi bukti bahwa kalian sudah memberikan seorang anak laki-laki dengan baik. Sekarang, giliran saya yang membalaskan budi meskipun tidak seberapa. *Ad Maiora Natus Sum.*
- Untuk Clara, mungkin tidak banyak kata-kata yang bisa menggambarkan seberapa besar rasa terima kasih gua untuk lu. Terima kasih karena sudah hadir. Gua bersyukur bisa punya seorang teman, sahabat, partner, atau apapun itu namanya yang menjadi tempat nyaman untuk bercerita dan berkeluh kesah. *Apapun yang terjadi ya, ceb.*
- Untuk Rafliandus. Enggak menuliskan nama lengkap lu bukan berarti gua lupa sama lu. Terimakasih sudah mengajarkan banyak tentang arti hidup. Maaf kalau waktu itu kita gak bisa skripsian bareng. Skripsi ini, sedikit banyak, juga ada campur tangan dari lu. Tetap jadi Juple yang keras, kokoh, tangguh, dan selalu lembut hatinya, ple. *Audentes Fortuna Jufat.*
- Untuk Ariston. Banyak absurditas yang terjadi selama gua dan Aristo tinggal di Bandung beberapa bulan terakhir sebelum skripsi ini selesai. Terima kasih to, sudah jadi tempat cerita, bertukar pikiran, temen makan, minum, main, pinjam motor, dan semua kebaikan lu yang mungkin nggak bisa gua tulis di sini satu-satu. Sekarang saatnya kita kembali ke dunia masing-masing, sukses selalu. *Magis.*
- Untuk Vito, Tinong, Evan, Kosa, Japut, Aristo, Juple, Bonsky, Iping, Nathan, Habibie, Neyo, Pai. Hari-hari di Bandung tidak berkesan tanpa kalian. Terima kasih sudah jadi tempat melepas penat. Tidak pernah menyesal memutuskan untuk tinggal di Bukit Sari 9.
- Untuk Benedict Clementus, Ariel Leonidas, dan Babam Satimantus. Terima kasih. Kalian adalah motivasi buat gua untuk menyelesaikan skripsi ini. Kita selalu punya jalan dan cara hidup masing-masing, terima kasih untuk nggak pernah ninggalin satu sama lain. *Nati ad Maiora.*

DAFTAR ISI

Tanda Persetujuan Skripsi.....	1
Tanda Pengesahan Skripsi	i
Pernyataan.....	ii
Abstrak	iii
Abstract.....	iv
Kata Pengantar.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1 Deskripsi Masalah	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.2.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka	7
1.5 Kerangka Teori	11
1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	17
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
2.1. Norma ASEAN dalam Menjaga Stabilitas Kawasan: ZOPFAN, TAC, dan SEANWFZ	20
2.1.1. ZOPFAN.....	21
2.1.2. TAC.....	23
2.1.3. SEANWFZ	27
2.1.4. AOIP	29
2.2. Pembentukan AUKUS oleh Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat.....	31
2.3. AUKUS dan ASEAN.....	35
BAB III	38
3.1. Pembentukan AUKUS sebagai Indikator Tingginya Ketidakpastian Strategis di Kawasan	38

3.2. Pembentukan AUKUS sebagai Indikator Tingginya Konflik Kepentingan di Kawasan	45
3.3. Peran ASEAN sebagai Organisasi Internasional dalam menghadapi pembentukan AUKUS melalui <i>Prisoners' Dilemma</i>	52
BAB IV	63
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks <i>Strategic Functional Theory</i>	12
Tabel 3.1. Matriks Teori Permainan <i>Prisoner's Dilemma</i>	52

DAFTAR SINGKATAN

A2/AD	: Anti-Access/Area Denial
AOIP	: ASEAN Outlook on Indo-Pacific
ARF	: ASEAN Regional Forum
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
B3W	: Build Back Better World
BDN	: Blue Dot Network
COC	: Code of Conduct
IAEA	: International Atomic Energy Agency
NPT	: Non-Proliferation Treaty
NWS	: Nuclear Weapon States
PD	: Prisoner's Dilemma
PLA	: People Liberation Army
SEANWFZ	: Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone
TAC	: Treaty of Amity and Cooperation
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
ZOPFAN	: Zone of Peace Freedom and Neutrality

LAMPIRAN

Lampiran 1. Negara *Contracting Parties* Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

No	Negara	Tanggal	No	Negara	Tanggal
1	Indonesia	24 February 1976	27	Kanada	23 July 2010
2	Malaysia	24 February 1976	28	Turki	23 July 2010
3	Filipina	24 February 1976	29	Uni Eropa	12 July 2012
4	Singapura	24 February 1976	30	Inggris	12 July 2012
5	Thailand	24 February 1976	31	Brazil	17 November 2012
6	Brunei	7 January 1984	32	Norwegia	1 July 2013
7	Papua Nugini	6 July 1989	33	Chile	6 September 2016
8	Laos	29 June 1992	34	Mesir	6 September 2016
9	Vietnam	22 July 1992	35	Maroko	6 September 2016
10	Kamboja	23 January 1995	36	Iran	1 August 2018
11	Burma (Myanmar)	27 July 1995	37	Argentina	1 August 2018

12	RRC	8 October 2003	38	Peru	31 July 2019
13	India	8 October 2003	39	Jerman	2 November 2019
14	Japan	2 July 2004	40	Bahrain	2 November 2019
15	Pakistan	2 July 2004	41	Kolombia	10 November 2020
16	Korea Selatan	27 November 2004	42	Kuba	10 November 2020
17	Rusia	29 November 2004	43	Afrika Selatan	10 November 2020
18	Selandia Baru	25 July 2005	44	Denmark	3 August 2022
19	Mongolia	28 July 2005	45	Yunani	3 August 2022
20	Australia	10 December 2005	46	Belanda	3 August 2022
21	Prancis	20 July 2006	47	Oman	3 August 2022
22	Timor Leste	13 January 2007	48	Qatar	3 August 2022
23	Bangladesh	1 August 2007	49	Uni Emirat	3 August 2022
24	Sri Lanka	1 August 2007	50	Ukraina	10 November 2022
25	Korea Utara	24 July 2008	51	Spanyol	10 November 2022

26	Amerika Serikat	23 July 2009			
----	-----------------	--------------	--	--	--

Sumber: "Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia," ASEAN, diakses pada 23 Mei 2023, <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah organisasi kawasan di Asia Tenggara yang bertujuan untuk menciptakan kawasan yang damai, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menciptakan berbagai norma sebagai 'aturan main' bagi negara-negara anggotanya sekaligus negara dari luar kawasan yang ingin menjalin kerjasama atau beraktivitas di kawasan Asia Tenggara.

Diadopsi pada tahun 1976, Treaty of Amity and Cooperation (TAC) adalah perjanjian yang menjadi dasar bagi ASEAN dalam mengatur hubungan antar negara di Asia Tenggara.¹ TAC berisi prinsip universal tentang kerjasama dan koeksistensi damai yang mengikat hubungan di dalam dan luar kawasan. TAC telah diamandemen tiga kali dan saat ini memiliki 49 pihak yang terlibat.² TAC membantu ASEAN mempromosikan keamanan dan stabilitas kawasan melalui institusionalisasi komitmen pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai.

TAC juga memainkan peran penting dalam mewujudkan "ASEAN Way" dengan menarik negara non-ASEAN untuk bergabung dan memperkuat kerjasama dengan ASEAN. Negara non-ASEAN seperti Australia, Inggris, dan AS bergabung

¹ Daniel Seah, "The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: The Issue of Non-Intervention and its Accession by Australia and the USA," *Chinese journal of International Law* (2012): 785

² "Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)," ASEAN, diakses pada 13 Maret 2023, <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/outward-looking-community/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac/>

dengan TAC untuk memperoleh kepentingan keamanan dan mempertahankan akses terhadap sumber daya strategis, serta memainkan peran dalam dialog dan kerjasama di kawasan. Karakteristik TAC yang menekankan penyelesaian damai dan prinsip non-intervensi sesuai dengan kepentingan mereka untuk menghindari konflik dan menopang prinsip hukum internasional.³

TAC bersifat komplementer dengan The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) yang diadopsi lima tahun sebelumnya. ZOPFAN dibuat dengan tujuan untuk menciptakan zona di Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral; bebas dari intervensi negara di luar kawasan serta mendorong stabilitas, keamanan dan kerjasama.⁴ Deklarasi ini mendorong negara-negara di dalamnya untuk menghormati kedaulatan, integritas wilayah serta independensi politik. Meskipun tidak mencegah konflik dan sengketa, deklarasi ini menjadi fondasi yang penting dalam membangun kerjasama regional dan diplomasi dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Sebagai manifestasi dari komitmen ASEAN untuk saling berkoeksistensi secara damai dan penghormatan terhadap kedaulatan, terciptalah Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANWFZ) pada Desember 1995 melalui Deklarasi Bangkok.⁵ Perjanjian ini mewajibkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk tidak mengembangkan, membangun, dan memiliki senjata nuklir; tidak melakukan

³ Laura Southgate, "ASEAN: Still the zone of peace, freedom and neutrality?" *Political Science* Vol. 73 No. 1 (2021): 33

⁴ *Ibid*, 35

⁵ "Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)," Association of Southeast Asian Nations, diakses pada 3 Maret 2022, <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/peaceful-secure-and-stable-region/southeast-asia-nuclear-weapon-free-zone-seanwfz/>

uji coba atas senjata nuklir; tidak menerima bantuan senjata nuklir, serta tidak menyediakan bahan baku atau alat pengembangan senjata nuklir.⁶

SEANWFZ merupakan salah satu konfigurasi area bebas nuklir terbaru yang diciptakan pada era pasca perang dingin yang berbeda dari NWFZs lainnya yang dibuat dalam konteks perang dingin serta rivalitas militer antara negara-negara besar.⁷ Selain itu perbedaan mendasar antara SEANWFZ dengan NWFZ lainnya terletak pada area aplikasi perjanjian yang mencakup landas kontinental dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sebab, perjanjian area bebas nuklir lainnya hanya mencakup wilayah perairan dan tidak mencakup landas kontinental dan zona ekonomi eksklusif dari negara-negara yang berada di dalam zona bebas nuklir tersebut.⁸

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

AUKUS merupakan pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya dan Amerika Serikat (AS) untuk kawasan Indo Pasifik. Dalam pakta yang diumumkan pada tahun 2021 ini, ketiga negara tersebut bekerjasama dalam bidang kecerdasan artifisial, kemampuan bawah laut,

⁶ “Bangkok Treaty,” NTI, diakses pada 3 Maret 2022, <https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfz-treaty-bangkok-treaty/>

⁷ Surya P. Subedi, “Problems and Prospects for the Treaty on the Creation of a Nuclear-Weapon-Free Zone in Southeast Asia,” *The International Journal of Peace Studies* Vol. 4 No. 1 (1999): 2

⁸ “Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Treaty of Bangkok),” *Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes* (2013), <https://cils.ui.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Southeast-Asian-Nuclear-Weapon-Free-Zone-Treaty.pdf>

dan teknologi kuantum. Selain itu, AS dan Britania Raya juga bersepakat untuk membantu Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. AUKUS merupakan kerjasama yang berfokus pada kawasan Indo-Pasifik. Ketiga negara di dalamnya, meskipun tidak eksplisit ditunjukkan, secara eksklusif ingin meningkatkan pengaruh di kawasan ini sebagai perlawanan atas dominasi dan sikap asertif Cina.⁹

AUKUS dilihat sebagai sebuah institusi karena aliansi ini menjadi lapisan baru dalam dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.¹⁰ Sebab, berbagai kerjasama dalam bidang militer termasuk adanya pembangunan kapal selam bertenaga nuklir tentunya akan terus meluas untuk memperkuat kapabilitas militer serta proyeksi kekuatan AS di kawasan tersebut.¹¹ Maka dari itu, AUKUS terbentuk sebagai sebuah kelompok ‘minilateral’ yang hadir terlepas dari berbagai forum atau institusi multilateral lainnya yang sudah ada di kawasan tersebut sebelumnya. Dengan demikian, AUKUS dapat dilihat memiliki orientasi pada agenda yang lebih sempit dan eksklusif.¹²

Dengan kesepakatan ini, Australia akan menjadi negara ketujuh setelah Permanent-5 dan India yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk membawa dan menembakkan

⁹ Jamal Barnes dan Samuel M Makinda, “Testing the limits of international society? Trust, AUKUS and Indo-Pacific security,” *International Affairs* Vol. 98 No. 4 (2022): 1310.

¹⁰ MO Delanova, “The Impact of the Aukus Trilateral Defense Pact on the Indo-Pacific Regional Condition,” *Journal of Global Dynamics* Vol. 6, No. 2 (2021): 260

¹¹ Anthony Wende, “Emergence of AUKUS Pact as A Regional Bloc and Its Implications in Asia Continent,” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* Vol. 8, No. 1 (2022): 44.

¹² Jade Fraser, “AUKUS: More than meets the eye,” Lowy Institute The Interpreter, diakses pada 1 Juli 2023, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/aukus-more-meets-eye>

hulu ledak nuklir, kapal selam bertenaga nuklir tetap membawa potensi berbahaya bagi proliferasi nuklir serta stabilitas di sebuah kawasan. Kapal selam ini, memiliki kemampuan untuk berada di bawah laut lebih lama dan bersembunyi secara lebih baik dibandingkan dengan kapal selam konvensional. Hal ini membuat kapal selam tersebut sangat ideal untuk operasi pengintaian di mana kapal selam ini dengan sangat mudah dapat melewati Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Taiwan, India, Jepang hingga ke perbatasan Cina tanpa terdeteksi.¹³

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis akan berfokus pada ASEAN sebagai sebuah institusi di dalam kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan dengan adanya AUKUS. Dalam penelitian ini, AUKUS juga dilihat sebagai institusi yang memiliki sifat yang eksklusif dengan tujuan yang lebih sempit serta terarah. Lebih lanjut, penulis akan berfokus pada kesepakatan Australia untuk membangun dan mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan dari Amerika Serikat dan Britania Raya. Meskipun demikian, penulis juga akan berfokus pada kerjasama pada bidang lainnya di dalam AUKUS. Periode waktu yang difokuskan pada penelitian ini adalah sebelum November 2021 atau hingga AUKUS diumumkan oleh ketiga negara tersebut. Penelitian ini akan mengambil sudut pandang ASEAN

¹³ Abdi Manab Idris, Nugroho Adi Sasongko, dan Yanif Dwi Kuntjoro, "AUKUS Cooperation in the Form of Australian Nuclear Submarine Technology for Stability in IndoPacific Region," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* Vol. 4, No.2 (2022): 747

dalam melihat tantangan yang dihadapinya untuk mengaplikasikan norma-normanya dengan hadirnya AUKUS di kawasan tersebut.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, deskripsi masalah, dan pembatasan masalah yang telah dibahas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam penelitian ini adalah: **Mengapa ASEAN menghadapi tantangan institusional dengan adanya AUKUS di kawasan Indo-Pasifik?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan alasan ASEAN menghadapi tantangan institusional dengan adanya AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun, kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai dampak percaturan politik global terhadap agenda-agenda regional, dalam hal ini, norma dan aturan yang ada di dalam ASEAN.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti, analis, dan pengambil keputusan kebijakan luar negeri Indonesia serta negara-negara di

Asia Tenggara dalam mengupayakan implementasi norma-norma ASEAN baik secara internal maupun eksternal.

1.4 Tinjauan Pustaka

Terdapat kelompok pandangan yang berbeda dalam merespon AUKUS, secara khusus dalam melihat dampaknya terhadap ASEAN, stabilitas kawasan Indo-Pasifik, serta proliferasi nuklir di kawasan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang cenderung optimis dan merespon AUKUS secara positif. Kelompok ini melihat AUKUS dapat memberikan dampak yang positif bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya, serta turut mendorong stabilitas di Indo-Pasifik. Sementara itu, kelompok yang kedua memiliki optimisme yang sama terhadap AUKUS namun tetap melihat bahwa pakta di antara ketiga negara tersebut harus disikapi secara kritis oleh ASEAN. AUKUS dapat memberikan tantangan bagi organisasi kawasan tersebut, namun tidak berarti dapat membuat ASEAN menjadi termarginalisasi dan tidak relevan.

Tan (2022) menjelaskan bahwa terdapat respon yang berbeda terhadap AUKUS di antara negara-negara anggota ASEAN.¹⁴ Singapura, Vietnam, dan Filipina menganggap bahwa perjanjian ini dapat berkontribusi secara konstruktif bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Amerika Serikat dan Australia yang secara tegas mengungkapkan komitmen dan dukungan mereka terhadap sentralitas ASEAN. Tan melihat bahwa AUKUS bukan sekedar instrumen untuk menghadapi Cina, namun juga menjadi sebuah platform

¹⁴ See Seng Tan, "AUKUS: Not That Bad for ASEAN?" *Institute of Defence and Strategic Studies Paper No. 1* (2022): 1-3.

bagi ketiga negara di dalamnya, terutama AS untuk bekerja sama dalam inovasi militer. Pakta ini menjadi salah satu inisiatif terpenting selama era kepresidenan Biden dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kerja sama dengan ASEAN. Senada dengan Tan, Li (2022) melihat bahwa AUKUS telah menjadi sebuah kenyataan geostrategis di kawasan Indo-Pasifik.¹⁵ Meskipun tetap mempraktikkan hedging terhadap Cina, Li menekankan bahwa negara-negara di Asia Tenggara pada waktunya akan menerima AUKUS sebagai sebuah kerangka kerjasama yang semakin memperkuat keseimbangan kekuatan di kawasan. Hal ini pada akhirnya akan membantu menjaga stabilitas di Indo-Pasifik.

Kelompok kedua diwakili oleh Prayitno (2021) dengan pandangan yang sedikit berbeda dengan Tan dan Li. Dalam tulisannya, Prayitno melihat bahwa AUKUS dapat menjadi tantangan bagi negara-negara di Asia Tenggara karena dapat memicu perlombaan senjata dan mengakibatkan instabilitas di kawasan.¹⁶ Hal ini, dapat membuat sentralitas dan relevansi ASEAN dipertanyakan. Prayitno juga turut menyinggung SEANWFZ yang menurutnya menghadapi tantangan dalam implementasinya dengan hadirnya AUKUS meskipun tidak dijelaskan secara deskriptif dalam tulisannya. Namun, Prayitno menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak akan memperlemah sentralitas dan relevansi ASEAN. Sebagaimana tercantum dalam deklarasi dan piagamnya, ASEAN akan terus berhadapan dengan kekuatan dari luar kawasan namun tidak akan pernah membiarkan kekuatan-kekuatan ekstra-regional tersebut untuk mengintervensi. Hal ini turut didukung

¹⁵ Mingjiang Li, "ASEAN's responses to AUKUS: implications for strategic realignments in the Indo-Pacific," *China International Strategic Review* Vol. 4 (2022): 268-287.

¹⁶ Heru Prayitno, "AUKUS and the role of ASEAN centrality in managing regional security affairs," *Technum Social Sciences Journal* Vol. 26 (2021): 678-688.

oleh argumen Djalal (2021) yang justru melihat middle power seperti Australia dan negara-negara anggota ASEAN untuk turut berperan dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, ketika AS dan Cina yang bersaing berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri.¹⁷

Sementara itu, Choong dan Storey (2021) cenderung memiliki pandangan yang lebih kritis atas dampak AUKUS terhadap ASEAN.¹⁸ Dalam konteks aktivitas nuklir di kawasan, AUKUS menjadi sebuah preseden bagi proliferasi nuklir di masa depan dengan adanya program pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia. Di sisi lain, Choong dan Storey melihat bahwa AUKUS merefleksikan ketidakmampuan ASEAN dalam mengatasi agresifitas Cina di perairan, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Konsep keamanan ASEAN yang mengedepankan inklusivitas dan kerja sama terbukti tidak cukup sehingga AUKUS adalah respon yang alami untuk berhadapan dengan Cina di Indo-Pasifik.

Qiao-Francao dan Nandyatama (2023) menegaskan argumen di atas dengan melihat bahwa kompetisi antara AS dan Cina membuat implementasi norma ASEAN khususnya dalam konteks non-proliferasi nuklir.¹⁹ Di tengah persaingan AS-Cina dan terbaginya negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi persaingan tersebut, ASEAN akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerapkan strategi penyebaran normanya, membangun kerangka, mengaitkannya

¹⁷ Dino Patti Djalal, "ASEAN responses to AUKUS security dynamic," *East Asia Forum Quarterly* (October-December 2021): 16-18.

¹⁸ William Choong dan Ian Storey, "Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability," *ISEAS Perspective* No. 134 (2021): 1-12.

¹⁹ Guangyu Qiao-Franco dan Randy W. Nandyatama, "ASEAN as a Norm Entrepreneur in International Cooperation on Nuclear Non-proliferation: Bases, Pathways and Challenges," dalam *Norm Diffusion Beyond the West: Norm Research in International Relations* diedit oleh Sarka Kolmasova dan Ricardo Reboledo (Springer, Cham: 2023), 165-182.

dengan isu sambil menjaga netralitas dan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keberlanjutan sebagai kekuatan penggerak dalam pengembangan norma dalam isu non-proliferasi nuklir di kawasan, ASEAN harus melakukan pengamatan yang ketat terhadap ketentuan Perjanjian Zona Bebas Nuklir ASEAN (SEANWFZ) oleh semua negara anggota dan dengan hati-hati merumuskan posisi bersama untuk mengelola hubungan dengan negara-negara pemegang senjata nuklir.

Dalam penelitian ini, penulis cenderung memiliki argumen yang sesuai dengan kelompok kedua. Penulis melihat bahwa AUKUS menjadi sebuah alarm bagi ASEAN sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan berbagai norma yang telah dibangun seperti ZOPFAN, Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan, dan SEANWFZ. Meskipun melihatnya sebuah tantangan, penulis turut beranggapan bahwa sentralitas ASEAN menjadi sebuah kekuatan yang harus tetap dijaga dan dipandang secara optimis sekaligus kritis agar organisasi ini tetap memiliki relevansi dalam berbagai isu yang terjadi di kawasan, terutama dengan hadirnya AUKUS dan berbagai kerjasama di dalamnya. Tulisan ini sendiri juga akan mengisi kekosongan literatur-literatur yang telah dijelaskan di atas yang belum secara spesifik membahas tantangan seperti apa yang dihadapi dalam implementasi norma-norma ASEAN. Prayitno, misalnya, telah menyinggung CoC dan SEANWFZ namun belum menjelaskan secara deskriptif dalam literturnya karena melihat AUKUS dan implementasi norma-norma tersebut sebagai permasalahan yang berbeda.

1.5 Kerangka Teori

Strategic Functional Theory atau Teori Fungsional Strategis diperkenalkan oleh Kai He untuk menjelaskan secara spesifik 4 (empat) kondisi strategis di mana sebuah institusi memiliki peran yang relevan atau tidak.²⁰ Kai He mengasumsikan bahwa negara merupakan entitas politik yang didorong oleh kepentingan dan memiliki tujuan strategis untuk memaksimalkan kepentingannya tersebut di dalam sebuah dunia yang realistis. Di sisi lain, institusi dapat memfasilitasi tujuan realistis tersebut, meskipun hanya di dalam kondisi strategis tertentu. Meskipun demikian, asumsi tersebut belum tentu merefleksikan realita di politik internasional. Maka dari itu, teori ini tidak mengesampingkan peran identitas, pengalaman sejarah dan norma dalam membentuk perilaku sebuah negara.

Menurut Kai He, terdapat dua faktor yang membentuk situasi strategis bagi negara-negara dalam percaturan politik global, yaitu ketidakpastian dan konflik kepentingan. Ketidakpastian diukur dengan melihat seberapa pastinya suatu negara mengetahui maksud dan perilaku negara lain atau, dalam hal ini, negara yang menjadi pesaingnya. Ketika ketidakpastian rendah, artinya negara cukup yakin tentang apa yang akan dilakukan atau diinginkan oleh negara lainnya. Begitu sebaliknya ketika ketidakpastian tinggi. Sebagai contoh, dalam isu sengketa wilayah, tingkat ketidakpastian menjadi rendah karena klaim untuk kedaulatan seharusnya tidak memiliki kerancuan dan negara tahu apa yang diinginkan dan akan dilakukan oleh negara saingannya atas wilayah yang diperebutkan. Sementara

²⁰ Kai He, "A Strategic Functional Theory of Institutions and Rethinking Asian Regionalism: When Do Institutions Matter?" *Asian Survey* Vol. 54 No. 6 (2014): 1184-12-8.

itu, dalam isu modernisasi militer ketidakpastiannya menjadi tinggi karena sulit untuk mengetahui apakah hal tersebut ditujukan untuk pertahanan diri atau bersifat ofensif.

Sementara itu, konflik kepentingan ditandai dengan seberapa sulit bagi negara untuk berbagi kepentingan yang sama terhadap sebuah isu. Dapat berbentuk tinggi atau rendah. Sebuah isu yang memiliki konflik kepentingan yang rendah berarti negara yang berkonflik memiliki kepentingan yang sama. Sementara itu, sebuah isu dengan konflik kepentingan tinggi artinya negara yang berkonflik memiliki kepentingan yang tidak bisa diganggu gugat satu sama lain. Sebagai contoh, kasus sengketa wilayah dilihat sebagai isu dengan konflik kepentingan yang tinggi karena secara alamiah kedaulatan sebuah negara bersifat eksklusif. Di sisi lain, isu seperti kejahatan transnasional dilihat sebagai isu yang memiliki konflik kepentingan rendah karena negara-negara memiliki kepentingan yang sama untuk melawan kriminalitas internasional.

Dalam menjelaskan isu-isu strategis, Kai He menggunakan 4 (empat) *Game Theory*, yaitu *Prisoner's Dilemma*, *Game of Chicken*, *Stag Hunt*, dan *Battle of Sexes*. Masing-masing dari keempat *Game Theory* tersebut memiliki fungsi yang spesifik untuk menjelaskan kondisi strategis tertentu seperti yang dijelaskan melalui tabel di bawah ini. Perlu digaris bawahi bahwa keempat teori permainan ini merupakan bagian dari *Strategic Functional Theory*.

		Strategic Uncertainty	
		High	Low
Conflict of Interest	High	Prisoner's Dilemma (Information Sharing and Mechanism)	Game of Chicken (Limited Role of IOs)
	Low	Stag Hunt (Medium for Information Sharing)	Battle of the Sexes (Limited Role of IOs)

Tabel 1.1 Matriks *Strategic Functional Theory*

Sumber: Kai He, "A Strategic Functional Theory of Institutions and Rethinking Asian Regionalism: When Do Institutions Matter?" *Asian Survey* Vol. 54 No. 6 (2014): 1192

Prisoners' Dilemma dibentuk oleh dua faktor strategis, yaitu tingginya faktor ketidakpastian dan isu konflik kepentingan. Karena kedua kriminal yang diilustrasikan dalam permainan ini tidak mengetahui motif atau intensi satu sama lain, maka ketidakpastiannya tinggi. Kemudian, karena satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan berbicara dengan harapan narapidana lain akan tetap diam, maka konflik kepentingan antara kedua narapidana menjadi tinggi. Dalam konteks politik internasional, teori permainan ini dapat digunakan untuk menjelaskan topik modernisasi militer. Ketika sebuah negara, misalnya negara A, memutuskan untuk membeli lebih banyak senjata, maka negara B sebagai rivalnya sulit untuk mengetahui apakah intensi negara A untuk memodernisasi militernya bersifat defensif atau ofensif.

Teori Permainan ini menunjukkan masalah kolaborasi dalam hubungan internasional. Negara-negara sebetulnya tahu bahwa kerjasama merupakan hal

yang baik. Dalam konteks modernisasi senjata, misalnya, kedua negara dapat menandatangani perjanjian kontrol senjata untuk mengurangi ancaman keamanan bilateral sekaligus menghemat anggaran. Namun dalam kenyataannya, peluang untuk bekerjasama menjadi minim karena sifat alamiah negara yang didorong oleh kepentingan pribadi serta minimnya pertukaran informasi antara kedua negara. Maka dari itu, institusi atau organisasi internasional sebetulnya dapat berperan dalam situasi ini untuk membantu negara bekerjasama melalui dua cara. Pertama, institusi dapat menyediakan informasi agar ketidakpastian terkait intensi dan perilaku sebuah negara dapat lebih mudah dicermati oleh negara lain. Sayangnya, peran ini memiliki kelemahan karena institusi tidak bisa memastikan komitmen dari kedua negara. Maka dari itu dibutuhkan peran institusi yang kedua, yaitu untuk menyediakan mekanisme yang mengikat dan kuat, di mana pihak atau negara yang tidak mentaati mekanisme tersebut akan menerima konsekuensi atau hukuman. Untuk itu, institusi harus terinstitusionalisasi secara kuat agar bisa mendorong dan membuat negara tunduk terhadap mekanisme tersebut.

Teori Permainan berikutnya adalah permainan *Stag Hunt*. Teori Permainan ini merupakan sebuah permasalahan koordinasi karena kedua pemburu tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemburu lainnya. *Stag Hunt* dibentuk oleh dua faktor, yaitu tingginya ketidakpastian dan rendahnya konflik kepentingan. Ketidakpastian tinggi karena kedua pemburu tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemburu lain. Namun, konflik kepentingan rendah karena keduanya berbagi kepentingan yang sama untuk berburu rusa. Permainan ini berbalik dengan

PD karena dalam PD, kebebasan seorang narapidana bergantung pada kemungkinan terburuk yang terjadi pada narapidana lainnya.

Dalam permainan ini, institusi dapat berperan cukup maksimal untuk mengatasi permasalahan antara kedua negara melalui pertukaran informasi. Selain itu, institusi jika dapat berperan sebagai sebuah medium, misalnya melalui konvensi, untuk mendorong negara bekerjasama mengatasi ancaman-ancaman non tradisional. Karenanya, permainan ini juga disebut sebagai 'assurance game' di mana jaminan terkait informasi, alih-alih mekanisme yang mengikat, lebih diperlukan untuk mengatasi masalah yang membutuhkan tindakan kolektif

Game of Chicken mengilustrasikan dua pengemudi saling melaju ke arah satu sama lain pada sebuah jalan sempit. *Game of Chicken* cenderung terjadi pada kondisi ketidakpastian strategis yang rendah dan konflik kepentingan yang tinggi. Dalam konteks ini, karenanya, peran institusi menjadi terbatas untuk dua alasan. Pertama, institusi memperlemah kredibilitas sebuah negara untuk menyelesaikan sebuah isu alih-alih memperkuatnya. Mencari bantuan dari sebuah institusi atau organisasi internasional tidak akan membantu sebuah negara untuk mengatasi permasalahan ini. Peran institusi untuk memfasilitasi pertukaran informasi juga terbatas, karena negara-negara pada dasarnya sudah mengetahui motif atau keinginan satu sama lain serta apa yang terjadi apabila tidak ada yang berkompromi.

Salah satu peran institusi yang mungkin dapat dilakukan dalam situasi *Game of Chicken* adalah mendorong negara yang berseteru untuk memilih saling berkompromi. Meskipun hasil ini bukan hasil yang maksimal untuk kedua negara,

namun hal ini dapat menghindari kemungkinan terburuk berupa perang, atau tabrakan dalam konteks *Game of Chicken*. Namun penting untuk digaris bawahi bahwa untuk mencapai hal ini, organisasi yang melakukannya harus terinstitusionalisasi secara baik dengan mekanisme yang kuat. Kedua negara harus bisa diyakinkan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan atas yang lain. Dalam dunia yang anarki, sayangnya, hal ini sulit untuk tercapai karena tidak adanya otoritas yang lebih tinggi dari negara.

Teori Permainan yang keempat adalah *The Battle of Sexes* yang juga merupakan permainan koordinasi seperti *Stag Hunt*. Permainan ini mengilustrasikan sepasang suami istri yang telah sepakat untuk menghadiri sebuah acara pada malam hari. Namun menjelang acara tersebut mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan keduanya juga tidak mengingat apakah mereka bersepakat untuk menonton pertandingan tinju atau opera. Sang suami lebih suka menonton tinju sementara istrinya lebih menyukai opera, namun keduanya ingin datang bersama-sama entah ke acara yang mana daripada berpisah.

Permainan ini dibentuk oleh faktor ketidakpastian yang rendah juga konflik kepentingan yang rendah. Dalam politik internasional, permainan ini serupa dengan negosiasi perdagangan internasional. Negara tahu bahwa bekerjasama dalam perdagangan dan melakukan liberalisasi pasar akan berdampak positif. Namun, keuntungan dalam perdagangan internasional pada satu negara berbeda dengan negara lain. Sulitnya negosiasi perdagangan adalah bukan dalam meyakinkan kedua negara untuk saling berdagang, namun dalam mencapai kesepakatan bahwa ketimpangannya minim dalam perdagangan tersebut.

Maka dari itu, peran institusi menjadi terbatas dalam situasi ini. Sebuah organisasi internasional tentunya bisa menyediakan informasi dan transparansi terkait seberapa baik perdagangan internasional ini dapat berdampak untuk negara. Namun, hal ini akan membuat negara semakin sadar dengan perbedaan distribusi keuntungan dari perdagangan tersebut. Malahan, semakin besar volume perdagangan yang disepakati, maka akan semakin besar juga perbedaan distribusional antara kedua negara. Situasinya dapat berbeda jika institusi tersebut dipimpin oleh sebuah hegemon, yang dapat berperan untuk merelokasi keuntungan dari perdagangan antar negara. Artinya, seperti pada Game of Chicken, kekuatan (power) lebih berguna dibandingkan institusi dalam sebuah permainan koordinasi seperti ini.

1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data-data non-numerik. Artinya, penelitian ini akan berfokus pada fakta, wacana, atau pertanyaan yang sifatnya tekstual berbentuk dokumen. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari pemerintah, dokumen dari sumber-sumber swasta (termasuk dokumen yang diproduksi oleh organisasi atau institut), keluaran media massa, serta keluaran virtual seperti sumber-sumber internet.²¹ Dokumen-dokumen tersebut kemudian akan dikumpulkan dan dianalisa.

²¹ Alan Bryman, *Social Research Methods* (Oxford, Oxford University Press: 2012), 543

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara induksi untuk melakukan analisis antara data-data sekunder yang telah dikumpulkan dengan teori yang digunakan. Pendekatan ini berarti peneliti mencari penjelasan universal dari fenomena yang diangkat dalam penelitian ini melalui pengumpulan data baik yang konsisten maupun inkonsisten dengan penjelasan hipotetikal dari penelitian ini. Metode penelitian ini dilakukan dengan menyusun pertanyaan penelitian awal yang bersifat kasar dan membentuk hipotesis dari rumusan masalah tersebut. Analisis kemudian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, jika terdapat kasus yang inkonsisten atau berlawanan dengan hipotesis awal, maka hipotesisnya akan didefinisikan kembali untuk menghindari kasus-kasus yang menyimpang tersebut.²²

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi ke dalam empat buah bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan penelitian.

Kemudian, Bab kedua dengan judul Norma ASEAN dan AUKUS: Tantangan dalam Menjaga Stabilitas Kawasan memberikan data-data serta ulasan mengenai kesulitan ASEAN dalam mengimplementasikan norma di dalamnya,

²² Ibid, 566

yaitu Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation (TAC), dan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ). Selain itu, akan diulas juga mengenai AUKUS sebagai pakta pertahanan trilateral antara Australia, Britania Raya dan Amerika Serikat berikut dengan karakteristik di dalamnya.

Bab ketiga memberikan penjelasan dan analisis terhadap situasi ketidakpastian strategis serta konflik kepentingan di kawasan Indo-Pasifik yang tinggi serta AUKUS sebagai salah satu indikatornya. Bab ini juga menjelaskan peran yang dapat dimainkan oleh ASEAN secara ideal sebagai sebuah organisasi internasional serta bagaimana peran tersebut dijalankan. Penelitian ini ditutup dengan Kesimpulan yang berisi uraian singkat dari bagian-bagian sebelumnya dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.